BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik luar negeri merupakan salah satu arah kebijakan suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain, dengan tujuan utama untuk melindungi dan memajukan negara di ranah internasional. Kebijakan luar negeri ini mencakup rencana atau strategi yang disusun oleh para pengambil keputusan untuk menghadapi negara lain dan entitas politik internasional lainnya, demi mencapai kepentingan negara yang mereka pimpin. Dalam praktiknya, politik luar negeri berfungsi sebagai jembatan antara kondisi domestik dan dinamika internasional, yang harus berjalan seiring. Di Indonesia, kepemimpinan dalam politik luar negeri ini menjadi tanggung jawab penuh Presiden. yang dibantu Mentri Luar Ngeri, yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri sesuai arahan Presiden. Seorang Presiden dituntut untuk memahami situasi internasional yang terus berubah dan mengidentifikasi kebutuhan serta langkah-langkah penting yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dari kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan.[1]

Politik luar negeri Indonesia menjadi tanggung jawab Presiden sebagai kepala negara. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan keputusan dengan negara lain, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan Menteri Luar Negeri, sebagai pembantu Presiden, Menteri Luar Negeri Indonesia memiliki peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Ia bertugas memperkuat hubungan diplomatik dengan negara lain dan organisasi internasional, serta menangani kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Selain itu, Menteri juga

[1] M Zulhan Arifin, Jumaidi, and Najamuddin, "Politik Luar Negeri Indonesia Masa Transisi Pemerintahan Orde Lama Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1973," *Jurnal Pattingalloang* 5, no. 1 (2018): 100–111.

melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, menyediakan perlindungan konsuler bagi pekerja migran, pelajar, dan wisatawan. Ia juga berperan dalam penyelesaian konflik dan repatriasi WNI. Dengan mempromosikan citra Indonesia di kancah internasional, Menteri memastikan kebijakan luar negeri sejalan dengan pembangunan nasional dan menjaga kedaulatan negara.

Pada tahun 1966, Indonesia memasuki periode transisi yang penuh tantangan setelah peristiwa G30S/PKI yang mengguncang negara. Kejatuhan Presiden Soekarno dan beralihnya kekuasaan kepada Soeharto melalui Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) menandai dimulainya periode baru dalam politik Indonesia, yang dikenal dengan Orde Baru.[2] Salah satu langkah awal yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru adalah menunjuk Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri pada 24 Maret 1966. Menegaskan komitmennya dalam restrukturisasi pemerintahan pasca-Sukarno.Adam Malik memainkan peran yang sangat penting dalam proses transisi kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Soeharto, yang memungkinkan dirinya untuk tetap terlibat dalam periode perubahan tersebut. Bersama Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX, ia tergabung dalam kelompok yang dikenal sebagai "Tiga Tokoh Ampera," dan secara aktif mendukung peralihan menuju Orde Baru setelah peristiwa G30S 1965.

Adam Malik juga dikenal memiliki hubungan yang harmonis dengan militer, yang pada saat itu merupakan kekuatan dominan dalam transisi kekuasaan. Kedekatannya dengan kelompok Murba dan para tokohnya memungkinkan Soeharto menjalin komunikasi dengan mereka, menandakan adanya kemitraan yang saling menguntungkan. Yang menarik, Adam Malik tidak dipandang sebagai ancaman bagi kekuasaan Soeharto. Keberpihakannya pada diplomasi dan kebijakan luar negeri, serta sikapnya yang non-konfrontatif terhadap rezim baru, membantunya diterima dalam pemerintahan Orde Baru. Kehadirannya dalam kabinet turut menciptakan stabilitas politik yang sangat diperlukan di masa transisi tersebut. Keahlian Adam Malik dalam bidang diplomasi juga berkontribusi pada

[2] Harsja. S, *Sejarah Politik Indonesia Modern* (jakarta: pustaka lp3s, 2008). hlm 240-245

perbaikan hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat, yang sangat penting untuk pemulihan ekonomi dan politik setelah era Sukarno. Perannya dalam perundingan internasional menunjukkan kemampuannya untuk menjaga kepentingan nasional dan membangun hubungan konstruktif dengan komunitas internasional.[3]

Adam Malik lahir pada tanggal 22 Juli 1928 di Pematang Siantar, Sumatra Utara, Adam Malik terlahir dari pasangan Haji Abdul Malik Batubara dan Salamah Malik dalam keluarga yang cukup sederhana.[4] Sejak muda, ia tertarik pada dunia jurnalistik dan aktif menulis untuk beberapa surat kabar lokal. Kariernya sebagai jurnalis membawanya ke dunia politik dan diplomasi, terutama setelah Indonesia merdeka. Pada usia muda, ia sudah terlibat dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dan dengan bergabung Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Su karno. Namun, ia kemudian mengalihkan fokusnya ke dunia diplomasi dan politik internasional, sebuah langkah yang membentuk perjalanan kariernya yang cemerlang. Pada awal 1950-an, Adam Malik mulai mengukir nama sebagai seorang diplomat muda, dan ia dipercaya untuk menduduki posisi penting sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.[5]

Dalam karier politiknya, Adam Malik menunjukkan kecerdasan diplomatik yang luar biasa. Ia dikenal sebagai seorang diplomat yang mampu membangun hubungan internasional yang kuat, tanpa terjebak dalam ideologi atau aliansi tertentu. Ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan pada 1966 melalui Supersemar, Adam Malik diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Dalam posisi ini, ia berperan penting dalam mengubah kebijakan luar negeri Indonesia yang sebelumnya bersifat ideologis dan konfrontatif menjadi lebih pragmatis, terbuka, dan realistis. Salah satu pencapaiannya yang paling signifikan adalah keberhasilannya mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia dan mendirikan ASEAN pada 1967, serta memperkenalkan Indonesia kembali ke panggung internasional.

---

[3] F. Abdurrahman, *Peran Adam Malik Dalam Diplomasi Indonesia* (jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2013). hlm 130
[4] Solihin Salim, *Adam Malik Profil Seorang Pejuang* (jakarta: gunung jati, 1976).
[5] Mochtar Lubis, *Adam Malik: The Diplomat* (Jakarta: Kompas, 1984).

Adam Malik sebelumnya, pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Keberhasilan Adam Malik dalam dunia diplomasi sudah terbukti, dan ini membuatnya menjadi pilihan utama untuk mengemban tugas berat tersebut. Di bawah kepemimpinan Adam Malik, Indonesia memulai upaya untuk keluar dari isolasi internasional yang telah berlangsung sejak kebijakan luar negeri Soekarno, yang cenderung konfrontatif dan terikat dengan ideologi Blok Timur. Selain itu, kebijakan luar negeri Soekarno, yang bersifat ideologis dan bersifat anti-Barat, menyebabkan hubungan Indonesia dengan negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, mengalami ketegangan.[6]

Pentingnya diplomasi dalam menjaga kestabilan politik dan ekonomi Indonesia di dunia internasional tidak dapat dipandang sebelah mata. Adam Malik memulai masa jabatannya dengan tujuan untuk meredakan ketegangan yang terjadi dengan negara-negara Barat dan memperbaiki hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara tersebut. Dalam konteks ini, Adam Malik memperkenalkan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih bersifat pragmatis dan terbuka, yang memungkinkan negara untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara besar, baik dari Blok Barat maupun Blok Timur, namun tetap mempertahankan politik non-blok sebagai landasan utamanya.[7]

Pada awal Orde Baru, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyusun kebijakan luar negeri untuk memperbaiki hubungan dengan negara tetangga dan memperkuat posisi internasional. Salah satu masalah utama adalah konfrontasi dengan Malaysia yang dimulai pada masa Soekarno. Di bawah kepemimpinan Adam Malik, Indonesia berhasil mengakhiri kebijakan konfrontasi dengan Malaysia pada 1967, yang membuka peluang untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dan memperkuat kerjasama teritorial. Selain itu, Indonesia berperan aktif dalam mendirikan ASEAN pada 1967 bersama negara-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[6] Mochtar Kusumaatmadja *"Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Dari Soekarno ke Soeharto,"* (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), hlm. 133-150.

[7] Tri Widodo *"Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia: Non-Blok dalam Diplomasi Adam Malik"* (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm. 95-110.

negara seperti Thailand, Singapura, Filipina, dan Malaysia, dengan tujuan menciptakan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di kawasan Asia Tenggara.[8]

Adam Malik juga memfokuskan perhatian pada pembentukan hubungan diplomatik yang lebih konstruktif dengan negara-negara besar lainnya, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Diantara upaya yang diambil adalah memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat yang sempat tegang selama pemerintahan Soekarno. Adam Malik membuka dialog dengan negara-negara Barat dan berusaha meyakinkan mereka bahwa Indonesia tidak lagi condong ke Blok Timur atau Blok Barat, tetapi tetap pada prinsip non-blok, yang menekankan pada kemerdekaan dan kedaulatan negara.[9]

Selain itu, dalam kerangka diplomasi ekonomi, Adam Malik juga berperan besar dalam memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang dapat diandalkan dalam hal kerjasama ekonomi. Dengan membuka hubungan dengan negara-negara besar, Indonesia berhasil mendapatkan pinjaman dan investasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi domestik yang terdampak oleh krisis. Adam Malik juga memperkenalkan Indonesia pada lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF, yang memberi akses kepada Indonesia untuk mendapatkan bantuan ekonomi yang sangat diperlukan pada masa itu.

Selain peran diplomatiknya, Adam Malik berusaha memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang mendukung perdamaian dunia dan anti-kolonialisme, dengan memilih jalur non-blok selama Perang Dingin agar Indonesia tidak terlibat dalam konflik ideologis yang terjadi antara Blok Barat dan Blok Timur. Kebijakan ini menjadikan Indonesia sebagai pembela negara-negara berkembang dan pendukung kemerdekaan negara-negara yang masih terjajah. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia juga memainkan peran aktif di PBB, kembali menjadi anggota setelah sebelumnya menarik diri pada era Soekarno, dan memperkuat posisinya di forum internasional untuk memperjuangkan hak-hak negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[8] S. Prawira Nagara, *"ASEAN: Sejarah dan Peranannya dalam Diplomasi Asia Tenggara*," (Jakarta: UI Press, 2000), hlm. 110-125
[9] A. Hadi, *Indonesia dan Diplomasi Dunia* (Jakarta: UI Press, 2009), hlm 92

berkembang serta membangun solidaritas antara negara-negara yang menghadapi tantangan serupa dalam ekonomi dan politik.[10]

Selain itu, Adam Malik juga berperan penting dalam memperbaiki hubungan Indonesia dengan China. Meskipun hubungan Indonesia dengan China sempat tegang pada masa pemerintahan Soekarno, Adam Malik berhasil membuka kembali hubungan dengan negara tersebut, terutama dalam hal kerjasama ekonomi. Hal ini menunjukkan kemampuan Adam Malik untuk menjaga keseimbangan diplomatik, menjaga hubungan baik dengan negara besar dari berbagai blok, dan memaksimalkan potensi kerjasama internasional untuk kepentingan ekonomi Indonesia.

Melalui kebijakan luar negeri yang terbuka dan realistis, Adam Malik berhasil memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara-negara besar, menjadikan Indonesia lebih konstruktif dalam diplomasi internasional, dan memperkuat posisi negara di berbagai forum internasional. Sebagai negara yang bebas aktif, Indonesia mengedepankan kedaulatan dan kemerdekaannya tanpa terikat pada pengaruh negara besar. Warisan terbesar Adam Malik dalam kebijakan luar negeri adalah perannya dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan, terutama melalui ASEAN, di mana Indonesia berperan penting dalam menjaga keamanan dan kerjasama ekonomi di Asia Tenggara serta menghindari ketegangan antar negara yang bisa menarik intervensi kekuatan besar.[11]

Peran diplomatik Adam Malik juga sangat penting dalam memperkenalkan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. Indonesia di bawah kepemimpinan Adam Malik berfokus pada isu-isu internasional yang mendukung negara-negara berkembang, termasuk memperjuangkan hak-hak kemerdekaan negara-negara yang masih dijajah. Melalui forum ini, Indonesia berupaya untuk memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemerdekaan, dan persamaan hak di dunia internasional.[12] Di sisi lain, meskipun kebijakan luar negeri Indonesia semakin

---

[10] L. S. Santoso. *"Indonesia di PBB: Diplomasi Adam Malik dan Perjuangan Negara Berkembang,"* (Jakarta: Penerbit Universitas, 2003), hlm. 45-70.
[11] A. Wiryono, *"ASEAN dan Diplomasi Indonesia*," (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 88-102.
[12] Muhammad Lutfi, *"Diplomasi Indonesia: Kebijakan Luar Negeri Masa Orde Baru*," (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), hlm. 155-170.

terbuka dan pragmatis, Adam Malik tetap mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam dominasi negara-negara besar. Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang berarti Indonesia tidak akan terikat dalam konflik ideologis, tetapi akan berfokus pada kepentingan nasional dan perdamaian dunia.

Dari apa yang ditulis diatas peneliti menyimpan perhatian lebih terhadap masalah diatas dengan mengankat judul penelitian "Komparasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Adam Malik pada Masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru (1966-1977)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraikan di dalam larat belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis juga merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai sebagai berikut:

1. Bagaimana profil dan peran Adam Malik pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966)?
2. Bagaimana komparasi kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Adam Malik berada pada pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru (1966-1977?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai data yang membahas *Komparasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Adam Malik pada Masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru (1966-1977).* Maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan profil dsn peran Adam Malik pada masa pemerintahan Demorasi Terpimpin (1959–1966).
3. Untuk membandingkan kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Adam Malik berada pada pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru (1966-1977).

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitan*i Komparasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Adam Malik pada Masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru (1966-1977).*

tidak langsung disusun begitu saja tanpa adanya sumber informasi sebagai media pendukung dalam melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan beberapa karya tulis lain sebagai pembanding dan sumber informasi. Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber tulisan ilmiah yang membantu dalam penelitian sebagai kajian pustaka, yaitu:

1. Skripsi 2018 berjudul, *"Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945 Karya Adam Malik: Tinjauan Historiografi Indonesia*" oleh Hira Ririn Martifah (UIN Sunnan Gunung Djati Bandung). Skripsi ini menyoroti kontribusi Adam Malik sebagai tokoh bangsa dalam menyusun buku *Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945,* yang menggambarkan detik-detik menjelang dan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Buku Adam Malik digolongkan sebagai historiografi nasional yang mengedepankan perspektif Indonesia-sentris, menekankan narasi perjuangan bangsa sekaligus menanamkan nilai-nilai nasionalisme melalui pendekatan makro-historis. Skripsi ini juga membahas latar belakang Adam Malik sebagai pejuang dan tokoh politik, termasuk gaya penulisan dan kontribusinya dalam memperkaya historiografi Indonesia. Penelitian ini menempatkan Adam Malik sebagai figur penting yang mendokumentasikan momen bersejarah Proklamasi Kemerdekaan, sekaligus menunjukkan perkembangan historiografi Indonesia dari tradisional menuju modern. Adapun yang menjadi pembeda penulis adalah fokus penelitiannya, dimana skripsi ini berpokus kepada kotribusi Adam Malik dalam Histrografi Sejarah Indonesia, sedangkan penulis berfokus pada kebijakan dan Adam Malik pada masa demokrasi terpimpin dan orde baru, serta mengkomparasikan kedua kebijakan tersebut.
2. Skripsi 2016 berjudul, *POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF INDONESIA (Kajian Historis Perbandingan Kebijakan Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas sebagai Menteri Luar Negeri Tahun 1966-1998),* oleh Fiky Arista (Universitas Pendidikan Indonesia). Skripsi ini membandingkan kebijakan tiga Menteri Luar Negeri Indonesia di era Orde Baru, yaitu Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja, dan Ali Alatas, dalam melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Fokus utama penelitian ini mencakup perbedaan karakteristik kebijakan, pendekatan terhadap isu regional dan internasional, serta

sikap terhadap organisasi global seperti ASEAN, Non-Blok, dan PBB. Dalam penelitianya Fiky Arista menggunakan metode historis dengan pendekatan interdisipliner, menggabungkan analisis sejarah dengan konsep-konsep ilmu politik. Melalui analisis kebijakan tiga tokoh tersebut, menggambarkan bagaimana Adam Malik menangani transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, pendirian ASEAN, dan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia. Mochtar Kusumaatmadja, lebih berfokus pada hukum laut melalui konsep negara kepulauan serta menyelesaikan isu pengungsi Vietnam. Sementara itu, Ali Alatas memprioritaskan diplomasi strategis seperti normalisasi hubungan Indonesia-Cina dan penanganan masalah Timor Timur. Adapun perbedaanya dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penulis secara khusus memusatkan perhatian pada peran dan kebijakan Adam Malik pada masa transisi perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto masa demokrasi terpimpin dan masa kekuasaan seoharto (orde baru).

3. Artikel 2023 yang berjudul *"Adam Malik: Diplomat Dan Pejuang Yang Berperan Dalam Perundingan Internasional 1963-1970"* oleh Shintya Ayunityas (Universutas Negeri Semarang). Fokus utama penelitian ini adalah kontribusi Adam Malik sebagai diplomat dan pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam perundingan internasional pada periode 1963–1970, dengan fokus pada perannya dalam menyelesaikan Konfrontasi Indonesia-Malaysia serta pembentukan ASEAN. Sebagai diplomat berpengalaman, Adam Malik memanfaatkan pendekatan damai dan diplomasi aktif untuk memperbaiki hubungan Indonesia-Malaysia, yang berpuncak pada tercapainya Perjanjian Bangkok pada 1966, sebuah langkah yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Keberhasilannya dalam diplomasi tidak hanya menciptakan hubungan bilateral yang lebih baik, tetapi juga meletakkan dasar bagi kerja sama regional melalui pembentukan ASEAN, yang dirancang untuk memajukan kolaborasi ekonomi, sosial, dan budaya di Asia Tenggara, menjadikannya tonggak penting dalam politik luar negeri Indonesia. . Metode penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengacu pada sumber-sumber arsip, buku, dan artikel. Adapun yang menjadi pembeda adalah artikel berfokus pada

karier polik Internasional Adam Malik, penelitian saya menyajikan analisis yang lebih komprehensif dengan membedah landasan struktural politik serta mengkomparasikan pergeseran karakternya pada kebijakan dan komparasi anatara masa demokrasi terpimpin dan orde baru.

4. Artikel 2021 yang berjudul, *Sejarah Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pasca Reformasi.* Oleh Nasihatul Mila, dkk, (Institut Agama Islam Negeri Jember). Artikel ini membahas perkembangan politik luar negeri Republik Indonesia pasca reformasi, mulai dari pemerintahan B.J. Habibie hingga Joko Widodo, dengan fokus pada perubahan struktur dan strategi. Demokrasi lebih ditegakkan, sementara setiap pemimpin memiliki pendekatan berbeda. Habibie fokus pada pemulihan ekonomi dan isu Timor Timur, Gus Dur memperkenalkan gagasan kerja sama strategis yang kontroversial, Megawati memprioritaskan pemulihan kepercayaan dunia, SBY memperkuat posisi Indonesia di ASEAN, dan Jokowi menekankan perlindungan sumber daya nasional serta warga negara di luar negeri. Prinsip bebas aktif tetap menjadi dasar dalam menghadapi dinamika internasional. Penulis menyoroti pentingnya kebijakan luar negeri yang adaptif terhadap tantangan global dan domestik. Stabilitas nasional, diplomasi ekonomi, dan kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia menjadi perhatian utama.

E. Metode Penelitian

Metodologi sejarah berasal dari dua kata yaitu metode dan sejarah. Metode berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti jalan atau cara. Artinya, metodologi adalah ilmu yang membahas tentang sebuah prosedur atau cara yang memiliki tujuan untuk pencarian sumber- sumber sejarah yang kemudian akan ditulis menjadi cerita sejarah. Jika disederhanakan, metodologi adalah ilmu yang membahas tentang cara atau tata cara.[13] Sedangkan sejarah berasal dari bahasa Yunani yaitu Historia yang berarti ilmu, inkuri, wawancara dari saksimata. Pengertian sejarah yang paling umum adalah masa yang sudah berlalu umat manusia.

[13] Sulasman, "*Metodologi Penelitian Sejarah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 73

Dalam penulisan penelitian, *Komparasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Adam Malik pada Masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru (1966-1977),* peneliti menggunakan metodologi Sejarah, bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber yang kredible yang memungkinkan dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam metdologi penelitian sejarah ada empat tahap, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

1. Heuristik

   Heuristik adalah langkah awal dalam penelitian sejarah yang berarti mencari dan menemukan sumber sejarah. Tahapan ini mencakup pencarian, penelusuran, dan pengumpulan sumber, baik dari lokasi penelitian, temuan benda, maupun wawancara lisan.[14] Menurut Sulasman, sumber sejarah terbagi menjadi tiga kategori: sumber tertulis (dokumen atau prasasti), sumber lisan (kesaksian pelaku sejarah yang bergantung pada ingatan), dan sumber benda (artefak atau peninggalan budaya masa lampau).[15]

   Dalam penulisan hasil penelitian *Komparasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Adam Malik pada Masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru (1966-1977),* Penulis telah mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber yang menjadi acuan dalam penelitian. Dalam tahap heuristik, Penulis juga telah membagi dan mengklasifikasikan sumber sejarah yang telah ditemukan. Adapun sumber-sumber yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan adalah sebagai berikut:

   a. Sumber Primer

      Buku

      1. Malik, Adam.1978. Mengabdi Republik Jilid I.Jakarta: PT. Gunung Agung.
      2. Malik, Adam.1978. Mengabdi Republik Jilid II.Jakarta: PT. Gunung Agung.
      3. Malik, Adam.1979. Mengabdi Republik Jilid III.Jakarta: PT. Gunung Agung.

[14] Ibid. 93
[15] Sulasman, "*Metodologi Penelitian Sejarah*"…, hal 19.

4. Malik, Adam.1956. Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945.Jakarta: Widjaya.
5. Malik, Adam. 1984. Semua Bisa Diatur (Untaian Wicara Adam Malik 1983-1984). Jakarta: Leppenas
6. Malik, Adam. 1978. Si Bung Dari Siantar.Jakarta: Aries Lima.
7. Malik, Adam. 1976. Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru. Jakarta, Yayasan Idayu.

Arsip

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 Tahun 1966
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 Tahun 1966
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 1967.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 237 Tahun 1967
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 180 Tahun 1967.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 187 Tahun 1967.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 237 Tahun 1967.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 126 Tahun 1968.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 144 Tahun 1968.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1976.
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 51 Tahun 1976

b. Sumber Sekunder

1. A. Hadi. 2009. *Indonesia dan Diplomasi Dunia.* Jakarta: UI Press.
2. Abdurrahman. F. 2013. *Peran Adam Malik dalam Diplomasi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia.
3. Djamily, Bachtiar, A Hamid Lubis, dkk.1980. *Hidup dan Perjuangan Adam Malik* cet II.Jakarta. :Selecta Group.
4. Harsja S 2008. *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka LP3S.
5. Lubis. Mochtar. 1984. *Adam Malik: The Diplomat.* Jakarta: Kompas.
6. Lutfi, Muhammad. 1998. *"Diplomasi Indonesia: Kebijakan Luar Negeri Masa Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

7. Mochtar Kusumaatmadja.1994. *Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Dari Soekarno ke Soeharto,* Jakarta: Rajawali Pers.
8. Nurarta Situmorang, Suryagung Sudibyo. 2017. *Adam Malik Menembus Empat Zaman: Memperingati 100 Tahun Adam Malik*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
9. S. Prawira Nagara, 2000 *"ASEAN: Sejarah dan Peranannya dalam Diplomasi Asia Tenggara*. Jakarta: UI Press.
10. Salim, Solichin. 1978. *Adam Malik Profil Seorang Pejuang*, Jakarta: Gunung Jati.
11. Santoso. L. S. 2003. *Indonesia di PBB: Diplomasi Adam Malik dan Perjuangan Negara Berkembang,* Jakarta: Penerbit Universitas.
12. Setiawan, B. D. 2015. *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Asean Pada Masa Adam Malik Tahun 1967-1973*. Universitas PGRI Yogyakarta.
13. Tri Widodo 2002 *Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia: Non-Blok dalam Diplomasi Adam Malik,* Jakarta: LP3ES.
14. Wiryono. A. 2000. *ASEAN dan Diplomasi Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

2. Kritik

Tahap verifikasi atau kritik sumber bertujuan menilai kredibilitas dan autentisitas data sejarah. Kritik ini terbagi menjadi dua jenis: kritik ekstern untuk menguji keaslian sumber, dan kritik intern untuk menilai kebenaran serta kredibilitas isinya.[16] Kritik ekstern menilai keaslian sumber berdasarkan aspek fisik seperti kertas, tinta, gaya tulisan, dan bahasa. Sementara itu, kritik intern menguji kebenaran isi sumber dengan membandingkannya dengan sumber lain untuk memperoleh fakta yang lebih jelas dan lengkap..[17]

a. Kritik Ekstren

Kritik ekstern memastikan validitas dan akurasi sumber sejarah, sementara kritik intern menilai isi kesaksian sumber. Tahapannya meliputi

[16] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001), hlm 101
[17] Kuntowijoyo*, Pengantar Ilmu Sejarah*..., hlm 102

identifikasi karakteristik sumber, penilaian terhadap penulis sebagai penyampai informasi, dan perbandingan berbagai kesaksian untuk memperoleh hasil yang objektif.[18]

Buku

1. Mengabdi Republik jilid I,II dan III.

   Buku terbitan tahun 1978 dan 1980 yang diterbitka oleh PT Gunung Agung, buku ini karya Adam Malik yang berisi kumpulan catatan, pengalaman, dan pandangan Adam Malik selama berkiprah di dunia politik dan diplomasi Indonesia. Buku ini menggunakan Bahasa Indonesia, dengan kondisi buku cukup baik masih sangat jelas dibaca, tidak ada kertas yang sobek. Untuk bagaian cover depan dan belakang masih dalam keadan baik, namun kertasanya dalam keadaan sedikit menguning.
2. Semua Bisa Diatur

   Buku ini diterbitkan oleh Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (LEPPENAS), Jakarta. Buku ini karya Adam Malik adalah sebuah autobiografi yang memuat berbagai kisah hidup, pandangan politik. Tulisan buku ini menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena buku ini merupakan untaian wicara Adam Malik tahun 1983-1984. Keadaan buku ini cukup baik sangat jelas bacaanya
3. Si Bung dari Siantar

   Buku yang diterbitkan oleh Aries Lima di Jakarta, buku ini merupakan sebuah novel biografis yang berdasarkan wawancara langsung dengan Adam Malik dan keluarganya. dengan cover buku wajah Adam Malik, Buku ini kertasnya sudah dalam keadaan sedikit menguning, tulisannya menggunakan bahasa Indonesia.
4. Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945

[18] 15 M. Dien Majid dan Johan Wahyudi, "*Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*"…, hal 10

Buku yang diterbitkan oleh Widjaya Djakarta pada tahun 1956 yang ditulis langsung oleh Adam Malik dan menjadi salah-satu dari karyanya. Buku ini adalah sebuah catatan sejarah yang berisi tentang peristiwa monumental Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Keadaan buku ini dalam keadaan baik bacaanya sangat jelas dengan cover berwarna merah, namun kondisi kertas sudah menguning. Buku ini berisi 88 halaman.

6. Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru

   Buku yang diterbitkan tahun 1978 oleh Yayasan Idayu. Buku ini ditulis oleh Adam Malik berisi tentang merupakan transkrip atau dokumentasi dari ceramah yang disampaikan oleh Adam Malik pada 7 Agustus 1976 di Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta. Buku ini dalam keadan cukup baik masih sangat jelas dibaca, keadan kertas sedikit menguning

5. Hidup dan Perjuangan Adam Malik

   Buku yang diterbitkan tahun 1980 di Jakarta ini ditulis oleh Bachtiar Djamily,

   buku ini mengupas kisah hidupnya sejak masa kecil hingga menjadi salah satu pemimpin nasional yang berpengaruh, buku ini cetakan kedua dalam keadan cukup baik masih sangat jelas dibaca, keadan kertas sedikit menguning.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Arsip

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 1967.

   Keppres ini berisi tentang penugasan Menteri Luar Negeri Adam Malik mengunjungi negara-negara di Asia Tenggara. Arsip sudah digitalisasi, tulisan masih sangat terbaca dan kertas masih berwarna putih.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 180 Tahun 1967.

   Arsip ini berada di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dengan keadaan yang cukup baik dan masih terlihat jelas.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 187 Tahun 1967.

Arsip ini di keluarkan pada tahun 1967 yang di keluarkan oleh Presiden Soeharto, keadan arsip ini kondisinya sangat baik dan tulisanya masih sangat jelas dengan kertas berwarna putih.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 237 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Sekertaruat Nasional Asean.

   Arsio dalam keadaan fisik yang baik, dengan bagian-bagian yang masih terbaca.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 126 Tahun 1968.

   Keadaan arsip ini masih bisa di baca dengan jelas, dengan dua lembar dan sudah berbentuk digital.

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 144 Tahun 1968.

   Keterbacaan arsip ini sedikit masih bisa di baca, ada beberapa kata dan ejaan yang kabur, namun tidak mengurangi esensi dari arsip tersebut.

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1976 Susunan Delegasi Republik Indonesia Untuk Menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi Asean Di Bali Tanggal 23-25 Pebruari 1976.

   Arsip berada dalam kondisi fisik yang baik untuk di baca. Halaman-halaman dalam dokumen tampak teratur, dengan penomoran yang jelas untuk bagian dan pasal. Format dokumen mengikuti struktur resmi, dengan judul, tanggal, dan tanda tangan presiden.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1976 Tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Arsip ini kondisi fisik yang relatif baik, keterbacaan dan pemahaman isi. Secara keseluruhan, dokumen ini dapat diakses dan dipahami dengan baik.

b. Kritik Intern

   Kritik intern bertujuan untuk meneliti kebenaran sumber. Setelah menemukan kebenarannya asli sumber tersebut maka dilanjutkan dengan kritis dan tajam mengenai isi, apakah dapat dipercaya kebenarannya. Beberapa sumber-sumber primer yang menjadi rekapan dalam melakukan kritik Intern ini sebagai sumber primer penelitian ini:

Buku

1. Mengabdi Republik jilid I,II dan III.

   Buku "Mengabdi Republik" karya Adam Malik, yang terdiri dari tiga jilid, adalah sebuah memoir mencerminkan perjalanan politik, diplomasi, dan pengabdian Adam Malik sebagai salah satu tokoh sentral dalam sejarah Indonesia. Dalam jilid pertama, Adam Malik menggambarkan perjalanan masa mudanya, keterlibatannya dalam pergerakan nasional, dan perjuangannya melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Ia juga mencatat perannya yang krusial dalam momen bersejarah seperti Proklamasi Kemerdekaan 1945. Jilid kedua berfokus pada peran Adam Malik sebagai diplomat, di mana ia berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Di sini, kita dapat menjumpai kiprah signifikan beliau di Konferensi Meja Bundar (KMB) serta hubungannya dengan negara-negara di dunia. Sementara itu, jilid ketiga menyoroti kontribusinya sebagai negarawan dan pemimpin dalam pemerintahan, termasuk saat ia menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, Mentri Luar Negeri Indonesia, serta pandangannya terhadap berbagai tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi bangsa. Buku ini memberikan gambaran mengenain bagaimana perjalanan Adam Malik sebagai negarawan, dan didalamnya termasuk sebagai Mentri Luar Negeri Indonesia, yang relevan dengan penelitian ini.

2. Semua Bisa Diatur (Untaian Wicara Adam Malik 1983-1984)

   Buku ini adalah kumpulan pidato, pernyataan, dan refleksi Adam Malik dalam periode akhir hidupnya, yang merekam pemikiran, pandangan, dan nilai-nilai yang ia pegang sebagai seorang negarawan. Buku ini mencerminkan pandangan Adam Malik tentang berbagai isu penting yang dihadapi Indonesia pada masa itu, termasuk pembangunan nasional, stabilitas politik, peran Indonesia di kancah internasional, dan nilai-nilai yang ia anggap penting untuk keberlangsungan bangsa, Buku ini sekaligus menjadi warisan pemikiran yang relevan untuk memahami

dinamika politik dan diplomasi Indonesia di era Orde Baru. Relevansi buku ini terhadap kajian kebijakan luar negeri Adam Malik terletak pada upaya untuk memahami pola pikir, pendekatan, dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan kebijakan luar negerinya. Meskipun buku ini tidak secara eksplisit merinci kebijakan tertentu, refleksi yang terkandung di dalamnya dapat memberikan wawasan tentang nilai-nilai yang ia pegang teguh dalam menghadapi berbagai situasi diplomatik.

3. Si Bung Dari Siantar

   Buku *Si Bung Dari Siantar* karya Adam Malik merupakan novel mini yang dibuat berdasarkan wawancara dengan tokoh terkait beserta keluarganya, buku ini memberikan gambaran mendalam tentang asal-usul Adam Malik, yang lahir di Pematang Siantar, Sumatra Utara, dan perjalanan hidupnya sebelum ia terjun ke dunia politik dan diplomasi. Dalam konteks peran Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, Buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang perjalanan seorang tokoh politik, tetapi juga tentang latar belakang budaya, sosial, dan sejarah yang membentuk pribadinya, yang mempengaruhi bagaimana ia membentuk visi dan kebijakan luar negeri yang pragmatis, memberikan wawasan mengenai pengalamannya dalam berurusan dengan berbagai tantangan internasional, termasuk dalam menghadapi konflik-konflik global dan isu-isu regional.

4. Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945

   Buku karya Adam Malik berjudul *Riwat Proklamasi 17 Agustus 1945* memberikan pandangan historis tentang perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Meskipun fokus utama buku ini adalah pada peristiwa proklamasi kemerdekaan, karya ini memberikan wawasan yang berharga mengenai sikap Adam Malik terhadap nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan. Dalam konteks ini, buku ini relevan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, karena keduanya dipengaruhi oleh semangat yang terkandung dalam

perjuangan kemerdekaan Indonesia, meskipun dalam konteks yang berbeda.

5. Hidup dan Perjuangan Adam Malik

   Buku memberikan wawasan penting mengenai kehidupan pribadi, perjuangan politik, dan peran Adam Malik dalam sejarah politik Indonesia. Buku ini menggambarkan bagaimana kebijakan luar negeri Adam Malik selama masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru terkait erat dengan perubahan politik domestik. Pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh ideologi Soekarno, sementara pada masa Orde Baru, kebijakan lebih fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. Buku Djamily memberikan wawasan penting mengenai perbedaan pendekatan ini dan bagaimana Adam Malik menavigasi perubahan tersebut, menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hubungan internasional yang stabil.

6. Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru

   Buku ini mendokumentasikan transisi kebijakan luar negeri Indonesia periode 1966–1976. Mencakup kembalinya prinsip bebas aktif, fokus pada pembangunan ekonomi, normalisasi hubungan regional, serta peran dalam pembentukan ASEAN.

Arsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 1967.

   Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1967 arsip resmi yang berisi penugasan kepada pejabat untuk melaksanakan tugas terkait kebijakan pemerintah, termasuk di dalamnya mentreri luar negeri Adam Malik, untuk perjalanan dinas mengunjungi Negra-negara Asia Tenggara, berdasarkan kewenangan presiden sesuai undang-undang, di dalam ini mencantumkan tanggal efektif berlakunya keputusan dan memastikan salinannya disampaikan kepada pihak terkait. Selain sebagai pengaturan administratif, keputusan ini bertujuan mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah secara strategis. Arsip ini relevan dangan penelitian ini.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 180 Tahun 1967.

Keputusan Presiden No. 180 Tahun 1967 menetapkan pengangkatan sejumlah menteri dalam Kabinet Ampera, termasuk Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri, Basuki Rachmat sebagai Menteri Dalam Negeri, dan Prof. Oerip Soemohardjo sebagai Menteri Kehakiman. Keputusan ini, berlaku sejak 11 Oktober 1967, bertujuan memperkuat struktur kabinet dan diambil berdasarkan dasar hukum yang berlaku. Salinannya disampaikan kepada pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang lebih efektif. Arsip ini menunjang dan relevan dalam penelitian ini.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 187 Tahun 1967.

   Keputusan Presiden No. 187 Tahun 1967 mengatur perjalanan dinas pejabat tinggi, termasuk Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri, ke beberapa negara Eropa seperti Roma, Holland, Paris, dan Yugoslavia untuk briefing dan memenuhi undangan resmi. Biaya perjalanan ditanggung oleh pemerintah melalui anggaran Direktorat Perjalanan Negeri, dengan pertanggungjawaban yang disertai bukti sah. Pejabat diminta melaksanakan tugas dengan baik, mematuhi peraturan, dan segera kembali setelah tugas selesai. Relevansi dengan penelitian adalah memberikan wawasan tentang strategi diplomasi yang diterapkan, peran aktif dalam hubungan internasional, serta dampak kebijakan luar negeri terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 237 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Sekertaruat Nasional Asean.

   Keputusan Presiden No. 237 Tahun 1967 mengatur pembentukan Sekretariat Nasional ASEAN yang bertugas mengorganisasi, mengoordinasi kegiatan, dan menjaga hubungan antar negara anggota ASEAN. Sekretariat ini juga menyelenggarakan pertemuan, seperti sidang tahunan, serta didukung oleh biro-biro seperti Biro Umum, Biro Ekonomi, dan Biro Sosial/Budaya. Keputusan ini bertujuan memperkuat kerjasama regional di Asia Tenggara dan memastikan kontribusi efektif dari setiap negara anggota dalam mencapai tujuan ASEAN. Relevansi dalam analisis

komparasi kebijakan Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, karena mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat kerjasama regional melalui pembentukan Sekretariat Nasional ASEAN. Sebagai Menteri Luar Negeri, Adam Malik berperan penting dalam memfasilitasi inisiatif ini, yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam stabilitas dan integrasi kawasan Asia Tenggara. Kebijakan ini sejalan dengan strategi luar negeri yang lebih luas pada masa itu, di mana Indonesia berusaha untuk membangun solidaritas antar negara-negara tetangga dan memperkuat posisinya di kancah internasional.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 126 Tahun 1968.

   Keputusan Presiden No. 126 Tahun 1968 menunjuk Adam Malik sebagai Ketua Rombongan dan Frans Seda sebagai Wakil Ketua untuk perjalanan dinas Presiden ke Jepang dan Kamboja. Mereka bertugas membimbing, mengawasi, dan memastikan semua anggota rombongan memahami tugas, menjaga disiplin, serta mencerminkan citra positif Indonesia. Di dalam ini mengatur kepatuhan terhadap rencana perjalanan dan memberi wewenang kepada Ketua dan Wakil Ketua untuk memberikan petunjuk tambahan demi kelancaran kunjungan kenegaraan. Relevansi dengan penelitian ini adalah diplomasi aktif Adam Malik dalam memperkuat hubungan bilateral, meningkatkan citra Indonesia, dan menyesuaikan kebijakan luar negeri dengan dinamika politik, mendukung stabilitas politik dan ekonomi.

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 144 Tahun 1968.

   Arsip ini berisi tentang mengatur pengangkatan Adam Malik sebagai Ketua Delegasi Indonesia untuk Sidang Komisi ECAFE ke-24 di Canberra, Australia. Dokumen ini menetapkan tugas delegasi untuk memimpin, menjaga hubungan diplomatik, melaksanakan tugas negara, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Presiden, dengan fokus pada menjaga citra negara dan kerja sama internasional. Relevansi dengan penelitian ini adalah menyoroti transisi dari kebijakan konfrontatif dan

ideologis pada masa Demokrasi Terpimpin ke pendekatan yang lebih pragmatis dan stabil pada masa Orde Baru.

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1976 Susunan

   Delegasi Republik Indonesia Untuk Menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi Asean di Bali Tanggal 23-25 Pebruari 1976. Isi dari arsip ini adalah menetapkan susunan delegasi Indonesia untuk menghadiri KTT ASEAN di Bali pada 23-25 Februari 1976, dengan Jenderal TNI Soeharto sebagai Ketua dan Adam Malik sebagai anggota delegasi bersama pejabat tinggi lainnya. Dokumen ini mengatur jadwal keberangkatan delegasi dan mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama regional ASEAN, menegaskan pentingnya pertemuan tersebut bagi politik dan ekonomi Asia Tenggara, sekaligus menunjukkan langkah strategis Indonesia dalam hubungan internasional. Relevansi dalam adalah adaptasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap dinamika politik global dan regional, mencerminkan upaya menciptakan stabilitas kawasan di era Orde Baru.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1976 Tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

   Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 51 Tahun 1976 menetapkan pokok-pokok organisasi Perwakilan RI di luar negeri untuk menyempurnakan hubungan diplomatik dan konsuler. Dokumen ini mendefinisikan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler beserta tugasnya, seperti mewakili negara, melindungi kepentingan nasional dan warga negara, serta meningkatkan hubungan internasional. Keputusan ini juga mengatur struktur organisasi, kepegawaian, dan pengawasan guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Relenasi dalam analisis kebijakan Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri, karena mencerminkan upaya memperkuat posisi diplomatik Indonesia sesuai visinya untuk meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral. Keppres ini mengatur struktur dan fungsi perwakilan diplomatik dan konsuler guna mendukung kebijakan luar negeri yang

efektif. Analisisnya menunjukkan kontribusi Adam Malik dalam memperkuat organisasi perwakilan, mendukung diplomasi Indonesia di era Orde Baru, dan menghadapi tantangan global dengan strategi yang adaptif terhadap dinamika domestik dan internasional.

3. Interpretasi

Tahap ketiga adalah interpretasi atau penafsiran sejarah, di mana fakta-fakta yang diperoleh disusun menjadi cerita sejarah. Interpretasi dilakukan dengan dua cara: pertama, interpretasi analisis, yaitu menguraikan fakta satu per satu untuk memperluas perspektif sebelum menarik kesimpulan; kedua, interpretasi sintesis, yaitu menggabungkan beberapa fakta untuk merumuskan kesimpulan yang lebih komprehensif..[19] Di interpretasi ini penulis menggunakan tahapan interpretasi analisis menguraikan fakta-fakta satu persatu baik primer dan sekunder, lalu digabungkan dan dianalisis satupersatu sehingga mendapatkan kesimpulan menjadi keseluruhan peristiwa yang harmonis dan masuk akal.

Teori *The Great Man* (manusia besar) yang dikemukakan oleh Thomas Carlyle menyatakan bahwa sejarah ditentukan oleh individu manusia luar biasa yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk jalannya peristiwa[20]. Dalam konteks politik luar negeri Indonesia, Adam Malik adalah contoh nyata dari figur pemimpin yang memainkan peran penting dalam dua era pemerintahan yang sangat berbeda, yaitu Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Orde Baru (1966–1977). Sementara itu, teori politik Thomas Hobbes dalam *Leviathan* menyatakan bahwa stabilitas negara hanya bisa dijamin oleh kekuasaan yang kuat, karena tanpa otoritas yang jelas, masyarakat akan jatuh ke dalam keadaan konflik dan anarki.[21] Kombinasi kedua teori ini membantu dalam memahami bagaimana Adam Malik mengelola kebijakan luar negeri Indonesia, baik dalam masa ketidakstabilan di bawah Soekarno maupun dalam pemerintahan otoriter

[19] Sulasman, "*Metodologi Penelitian Sejarah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal 226
[20] Ajid Thohir dan Ahmad Sahidin "*Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, dan Kritis"*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). Hlm 82-84.
[21] Wahyudi, M. N. (2022). *Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes Dan John Lock)*. An-Nawa: Jurnal Studi Islam, 4(2), hlm. 120

Soeharto yang lebih terstruktur. Secara keseluruhan, Komparasi Kebijakan Adam Malik Sebagai Meteri Luar Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru (1966-1977) selaras dengan teori politik Hobbes yang menekankan pentingnya otoritas kuat untuk menciptakan ketertiban dan melindungi negara dari ancaman internal maupun eksternal.

Pada era Demokrasi Terpimpin, kebijakan luar negeri Indonesia dikendalikan oleh Soekarno yang bersikap konfrontatif terhadap Barat dan Malaysia, membatasi peran Adam Malik meskipun ia tetap berupaya menjaga keseimbangan diplomasi. Dalam perspektif Carlyle, Adam Malik sebagai pemimpin visioner tetap terhambat oleh sistem politik yang sentralistik dan otoriter di bawah Soekarno. Setelah awal Orde Baru, Adam Malik menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan berperan penting dalam mengubah arah kebijakan luar negeri Indonesia dari pendekatan konfrontatif menjadi lebih diplomatis. Di bawah kepemimpinan Soeharto, yang menekankan pentingnya stabilitas sebagaimana dijelaskan oleh Hobbes, Adam Malik diberikan keleluasaan untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat dan Asia Tenggara. Ia berhasil mengembalikan Indonesia sebagai anggota PBB pada tahun 1966 serta turut serta dalam pembentukan ASEAN pada tahun 1967.

Dari perbandingan kebijakan luar negeri Adam Malik dalam dua era tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori The Great Man Carlyle dan teori politik Hobbes saling melengkapi dalam menjelaskan perannya. Di satu sisi, Adam Malik adalah tokoh besar yang mampu mengubah jalannya kebijakan luar negeri Indonesia, seperti yang dijelaskan Carlyle. Di sisi lain, ia juga beroperasi dalam sistem pemerintahan yang otoriter dan membutuhkan stabilitas, seperti yang ditekankan oleh Hobbes. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Adam Malik merupakan perpaduan antara visi pemimpin hebat yang adaptif dan realitas politik yang menuntut stabilitas serta kekuasaan yang kuat.

4. Historiografi

Historiografi berasal dari kata *histori* (sejarah) dan *grafi* (penulisan). Dalam perkembangannya, *historia* digunakan untuk

menggambarkan tindakan manusia secara kronologis di masa lalu. Menurut Helius Sjamsudin dalam Metodologi Sejarah, historiografi adalah pernyataan tentang masa lampau sekaligus sejarah perkembangan penulisan sejarah. Penulisan sejarah merupakan puncak kajian sejarah, di mana *historie-recite* (sejarah yang dikisahkan) berupaya memahami *historie-realitie* (sejarah yang sebenarnya terjadi), dan hasilnya disebut sebagai historiografi. [22] BAB I Pendahuluan, penulis menguraikan aspek penting seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiogrsfi. Bab ini memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian sebagai dasar atau pijakan untuk pembahasan bab-bab berikutnya. BAB II, dalam bab ini akan membahas tentang bagaimana gambaran umum profil Adam Malik sekaligus posisinya di masa Demokrasi Terpimpin dan kondisi politik pada saat itu BAB III, dalam bab ini akan membahas kebijakan Adam Malik pada masa transisi Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru serta komparasi di kedua masa tersebut BAB IV adalah bagian penutup pembahasannya adalah kesimpulan tulisan dari awal hingga akhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[22] Sulasman, "*Metodologi Penelitian Sejarah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal 147-148

uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG